

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran yang sama sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional.<sup>1</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.<sup>2</sup> Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.<sup>3</sup>

Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan fungsi, salah satu fungsinya ialah sebagai sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah, artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” (*the rulers*) dengan “mereka yang diperintah” (*the ruled*).<sup>4</sup>

Dalam suatu masyarakat modern, apalagi yang luas wilayahnya, aspirasi dan pendapat akan hilang tak terbekas, jika tidak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat lebih teratur. Dengan demikian pendapat dari masyarakat disampaikan kepada pemerintah dengan suatu arus dari bawah ke atas. Proses

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 403

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 404

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 404

<sup>4</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1982), hlm. 14

merumuskan kepentingan-kepentingan ini dinamakan “perumusan kepentingan” atau “artikulasi kepentingan”.<sup>5</sup>

Menurut Rush dan Althoff, komunikasi politik adalah sebuah tranmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada satu sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dengan sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik, dan proses sosialisasi, partisipasi serta rekrutmen politik tergantung pada komunikasi.<sup>6</sup>

Strategi komunikasi pada hakekatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu komunikasi politik harus menunjukkan oprasionalnya secara taktis harus dilakukan sesuai dengan pesannya, siapa komunikatornya serta media yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut dan efek apa yang diinginkannya. Dalam arti kata pendekatan yang dilakukan kepada khalayak bisa berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi. Demikan juga hubungannya dengan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh suatu partai politik, berhasil atau tidaknya sangat ditentukan oleh strategi komunikasi yang dilakukan saat kampanye politik.

Menurut UU tahun 2003 pasal 1 kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih. Dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2015 pasal 1, kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon yang akan mencalonkan dan informasi lainnya, dan bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.<sup>7</sup>

Roger dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.<sup>8</sup> Peau dan Parrot mengatakan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.15

<sup>6</sup> Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 24

<sup>8</sup> Gungun Heriyanto dan Irwa Zarkasyi, *Public Relations Politik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm.83

“kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan”.<sup>9</sup> Dengan demikian kampanye merupakan tindakan komunikasi yang terorganisir yang diarahkan pada khalayak tertentu, dan periode tertentu guna mencapai tujuan tertentu.

Tentunya kampanye ini berkaitan dengan strategi karena berhasil tidaknya kampanye ditentukan juga dengan strategi. Strategi menurut Arnold Steinberg adalah rencana untuk tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagal nya strategi pada akhirnya.<sup>10</sup> Strategi ini merupakan hal yang perlu dipersiapkan dengan matang karena berhasil atau tidaknya ditentukan dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi itu sendiri.

Merujuk pada pernyataan diatas maka, partai politik akan berlomba-lomba membentuk citra positif agar khalayak mau memilih partai tersebut. Tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS merupakan partai dakwah yang berazaskan islam, berdirinya PKS tidak bisa dipisahkan dari momentum reformasi yang terjadi sejak lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa mundurnya Presiden yang telah berkuasa kurang lebih 32 tahun disambut dengan euforia politik yang meluas. Efek yang paling terasa dari reformasi ini adalah banyak munculnya partai-partai politik dengan sangat cepat dalam kurun waktu kurang sepuluh bulan (akhir Mei 1998 hingga awal Februari 1999), jumlah partai politik berdiri mencapai 181 buah. Artinya pada masa itu setiap bulan berdiri sekitar 18 partai baru.

Partai keadilan yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998, dan dideklarasikan di Jakarta pada 9 Agustus, ada dalam puncak pendirian partai-partai. Partai keadilan adalah buah dari fenomena gerakan sosial keagamaan yang tumbuh sepanjang tahun 1980-an sampai era

---

<sup>9</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004) hlm. 8

<sup>10</sup> Toni Andrian Pito Dkk, *Mengenal Teori-teori Politik* ( Bandung: Penerbit Nuansa, 2006) hlm. 185

reformasi. Kemunculan awal gerakan dakwah kampus yang menjadi cikal bakal PK ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran kalangan modernis islam dimasa lalu dipresentasikan dengan baik oleh Masyumi tidak secara otomatis membuat jamaah gerakan dakwah ini juga mewakilkan aspirasi politiknya kepada penerus-penerus Masyumi.<sup>11</sup>

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan atau di singkat PK dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta dengan presiden (ketua) pertamanya Nurmahmudi Isma'il. Pada tahun 1999 PK gagal mencapai batas maksimum perolehan suara sehingga PK berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Asal-usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus meliputi serangkaian kegiatan yang menyeru pada agama yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan untuk kalangan mahasiswa di kampus. Pada awal 1980-an, dakwah kampus mulai memperkenalkan istilah *usrah* (bahasa arab yang berarti “keluarga”) dan mulai melakukan pengaturan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya dengan sistem dan program yang lebih simpatik. *Usrah* adalah kelompok-kelompok kecil yang saling berhubungan secara dekat serta dirajut melalui struktur hirarkis. Dari stuktur organisasi semacam ini, dakwah kampus berkembang pesat dan masjid-masjid kampus sejak itu menjadi pusat aktivitas mereka.<sup>12</sup>

Dakwah kampus makin berkibar seiring dengan momentum semangat kebangkitan islam yang muncul di kalangan masyarakat terdidik, terutama mahasiswa-mahasiswa di universitas sekuler pada tahun 1970-an. Semangat terlahir kembali sebagai muslim membuat kepercayaan diri mereka meningkat dalam melaksanakan nilai-nilai islam yang mereka pahami secara

---

<sup>11</sup> Remi Madinier, *Partai Masjumi*, (Jakarta: Mizan, 2013), hlm. 218-219

<sup>12</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS, Suara dan Syariah*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm. 32-37

simbolik. Pengaruh revivalisme islam ini terlihat dalam penggunaan jilbab dan baju koko dikalangan mahasiswa, semakin ramainya masjid kampus oleh aktivitas keagamaan, serta makin maraknya dunia penerbitan islam di kampus dan lain-lain.<sup>13</sup>

Ditengah makin maraknya kegaduhan sosial politik di fase-fase akhir menjelang kejatuhan Soeharto, KAMMI ( Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) muncul sebagai gerakan mahasiswa yang paling vokal dalam menyerukan ketidakpuasaan publik melalui aksi-aksi demonstrasi di seluruh pelosok negeri. Setelah pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998, tokoh-tokoh KAMMI mulai mempertimbangkan untuk mendirikan partai politik Islam. Pemikiran ini juga didukung oleh beberapa aktivis dakwah kampus yang berpandangan bahwa jejaring dan sumber daya gerakan dakwah telah ada seharusnya di transformasikan ke dalam partai politik. Namun, ada beberapa aktivis menolak gagasan tersebut dan mengusulkan gerakan dakwah menjadi peransiasi non-politik. Sebuah survei internal dilakukan diantara kader-kader gerakan ini hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas aktivis mereka setuju untuk mendirikan partai. Partai tersebut kemudian diberi nama “Partai Keadilan”.<sup>14</sup>

Pada tahun 1999, dalam pemilu demokratis pertama di Indonesia, PK gagal mencapai batas minimal perolehan suara yang memungkinkan partai itu berkompetisi pada pemilu berikutnya. Kegagalan ini sudah diprediksi oleh banyak kalangan, terkait dengan ketidakmampuan PK dalam menarik simpati pemilih baru. PK terlalu menutup diri bagi publik luas sehingga gagal memperebutkan pemilih yang lebih besar. Setelah kegagalan itu, PK berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada April 2002. Kemudian pada pemilu legislatif 2004, PKS berhasil meraih 7,34% atau 45 dari 550 kursi yang diperebutkan, sebuah

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 44-45

capaian yang luar biasa dibanding pendahulunya Partai Keadilan (PK), yang hanya memperoleh 1,3% pada pemilu 1999.<sup>15</sup>

PKS lahir melalui gerakan sosial bernama Tarbiyah yang kemudian berubah haluan menjadi partai politik. Basis sosial partai tersebut adalah kelompok muslim terdidik, muda, dan kelas menengah kota. Tidak seperti partai lain PKS mampu mendulang simpati publik dengan memobilisasi kader dan simpatisannya untuk melakukan kegiatan bakti sosial secara terus menerus dan tidak hanya menjelang pemilu. PKS tampil sebagai “partai kader” yang menerapkan standar ketat dalam proses rekrutmen dan pelatihan anggota-anggotanya, dan membantu korban alam di Indonesia.<sup>16</sup>

Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah *Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Masyarakat Madani* adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan: menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara. *Adil* adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan baik pembangunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial kemasyarakatan ditempatkan secara professional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas. Yakni sikap moderat, suatu keseimbangan yang terhindar dari jebakan dua kutub ekstrem, mengurangi dan melebihi ( *tafrith* dan *ifrath*).<sup>17</sup>

*Sejahtera* mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah, yakni keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kesejahteraan dalam arti yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 47

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.5

<sup>17</sup> Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera*, 2007, hlm.1



sejati adalah keseimbangan (*tawazun*) hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang memenuhi tuntutan-tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya (ruh, akal dan jasad).

*Bermartabat* secara individual dan sosial menuntut bangsa Indonesia untuk mendapatkan dirinya sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menampilkan dirinya, baik dalam aspek sosial, politik, maupun budaya secara elegan, sehingga memunculkan pengamatan dan kekaguman dari bangsa lain. Martabat muncul dari akhlak dan budi pekerti yang baik, mentalitas, etos kerja dan akhirnya bermuara pada integritas kepribadian dan muncul dalam wujud produktivitas dan kreativitas.<sup>18</sup>

Pembahasan mengenai eksistensi sebuah partai politik di Indonesia bukan merupakan hal baru. Pada dasarnya proses yang dilakukan oleh partai politik untuk memperoleh eksistensi adalah upaya untuk bersaing pada pemilu. PKS merupakan salah satu partai Indonesia yang berupaya memperoleh eksistensi. Hal ini dapat kita lihat pada pemilu 2004 lalu walaupun banyak partai politik bersaing untuk memperebutkan suara masyarakat dan berujung pada penentuan jumlah anggota parlemen, PKS yang merupakan partai baru mampu merebut suara 7,5 % atau 45 kursi, dan jumlah suara tersebut meningkat pada pemilu 2009 dengan perolehan suara 7,8% atau 57 kursi.

Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul “Model Kampanye Partai Keadilan Sejahtera dan Tingkat Perolehan Suara tahun 2004-2014 di Kabupaten Garut”.

Hal yang menarik dari tema ini adalah partai politik yang berasal dari gerakan dakwah kampus yaitu kegiatan yang menyeru keagamaan yang dilakukan oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa di kampus mampu berubah haluan menjadi partai politik islam. Walaupun banyak partai politik yang bersaing untuk memperebutkan suara masyarakat, PKS yang merupakan partai baru mampu merebut suara sebesar 7,5% pada pemilu 2004, dan kemudian suara tersebut

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm.1-2

meningkat pada tahun 2009. Di Kabupaten Garut sendiri perolehan suara dari tahun ketahun cukup signifikan, bahkan Wakil Bupati Kabupaten Garut Sekarang merupakan orang PKS sebagai ketua PKS tahun 2004, ini membuktikan bahwa PKS di Kabupaten Garut cukup menarik simpatik bagi masyarakat Garut sendiri. Bukan hanya itu perolehan suara pemilihan legislatif pun cukup mendapat tempat yang lumayan yakni dari tahun 2004 mendapatkan 5 kursi.

PKS di Kabupaten Garut didirikan pada tahun 1998 dengan nama awal PK (Partai Keadilan) oleh 7 orang (kader) yang membentuk Dewan Pengurus Daerah, diantaranya adalah Hilman Rasyid, H. Ahab Syihabudin, Natsir Haris, Bunyamin, Imron, Asep Tajul, dan dr. H. Helmi Budiman.

Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera adalah<sup>19</sup> :

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi, mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Membutuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum yang diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dan perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri pertahanan nasional. Mengembangkan otonomi daerah

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm.2-4



terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan ditingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas dan aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dan merebut kemerdekaannya.

2. Mengentaskan kemiskinan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman stuktur dan *upgrading* kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru berbasis *resources* dan *knowledge*. Semua itu dilaksanakan diatas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara pemilik modal dan pelaku usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.
3. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk

semua, dengan visi sehat badan, mental-spritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, berdisiplin kuat, beretos kerja kokoh, serta berdaya inovasi dan berkeaktifitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemerdayaan masyarakat yang dapat mewartahi dan membantu proses pembangunan yang kontinyu.

PKS, sebagai etintas politik nasional, secara subjektif berjuang dengan dasar aqidah, asas, dan moralitas islam untuk mencapai tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Bersama-sama dengan entitas politik lainnya secara kompetitif berjuang untuk mencapai cita-cita nasional. Islam secara eksternal adalah bentuk diferensiasi dan sekaligus positioning PKS sebagai entitas politik nasional berhadapan dengan entitas politik lainnya. Disisi lain dengan menjadikan islam sebagai aqidah, asas, dan berbasis moral, maka PKS berkeyakinan dan ingin menegaskan, bahwa secara internal-subjektif aktivitas politik adalah “ibadah”, yang apabila bertujuan untuk kemaslahatan umat, didasarkan pada niat yang ikhlas untuk mencari ridha Allah SWT, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang baik dengan akhlak terpuji, maka aktivitas ini menjadi ibadah yang bernilai “amal shalih”.<sup>20</sup>

Penulis mencoba melihat model kampanye seperti apa yang dilakukan untuk menarik simpatik para pemilih pada pemilu tahun 2004-2014 sehingga perolehan suara meningkat. PKS yang merupakan partai baru dan mampu mencuri perhatian masyarakat khususnya di Kabupaten Garut.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.32

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan dari masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) serta keberadaannya di Kabupaten Garut tahun 2004-2014?
2. Bagaimana Model Kampanye dan Tingkat Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Pada tahun 2004-2014 di Kabupaten Garut?
3. Bagaimana hubungan model kampanye dengan tingkat perolehan suara pada tahun 2004-2014 di Kabupaten Garut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) serta keberadaannya di Kabupaten Garut tahun 2004-2014.
2. Model Kampanye dan Tingkat Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera Pada tahun 2004-2014 di Kabupaten Garut.
3. Hubungan model kampanye dengan tingkat perolehan suara pada tahun 2004-2014 di Kabupaten Garut.

### **D. Langkah-langkah Penelitian**

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian Sejarah, yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber untuk mendapatkan data. Dalam proses mencari dan mengumpulkan sumber, penulis melakukan penelusuran ke beberapa perpustakaan, seperti perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, perpustakaan Batu Api Jatinangor dan perpustakaan Daerah Jawa Barat.

Selain ke perpustakaan, pencarian sumber juga dilakukan ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut dan ke kantor Dewan Pengurus Daerah PKS Kabupaten Garut. Sedangkan untuk mendapatkan sumber lisan, penulis mencoba mewawancarai beberapa orang pengurus DPD Kabupaten Garut, diantaranya :

1. H. Nevi Hendri , S.Pd. I, laki-laki, 49 tahun, sebagai Wakil Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat. Wawancara dilakukan pada hari senin, tanggal 11 September 2017 di kantor DPW PKS Jawa Barat.
2. Saepullah, Sc, laki-laki, 40 tahun, sebagai Ketua Bidang Kepemudaan dan Olahraga (Saksi Sejarah karena beliau ikut serta saat deklarasi PKS di Masjid Al-Ahzar Jakarta) DPD PKS Kabupaten Garut, wawancara dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017 di kantor DPD PKS Kabupaten Garut.
3. Adi Nugraha, laki-laki, 38 tahun, sebagai Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Garut, wawancara dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017 di Kantor DPD PKS Kabupaten Garut.
4. Ir. Wawan Kurnia, laki-laki, 40 tahun, sebagai Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Garut, wawancara dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2017 di Kantor DPD PKS Kabupaten Garut.

5. Indra Kurniawan, laki-laki , 40 tahun, sebagai staf humas DPW PKS Jawa Barat, wawancara dilakukan pada hari senin , tanggal 11 September 2017 di kantor DPW PKS Jawa Barat

Adapun Sumber tertulis yang berupa arsip yang berhasil diperoleh antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Pemilu Legislatif tahun 2014
2. Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013
3. Stuktur Kepengurusan DPD PKS Kabupaten Garut
4. Surat Keterangan Domisili
5. Ppt Kampanye Partai Keadilan Sejahtera (Tim Kampanye Jawa Barat)

Sedangkan sumber-sumber sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Aay Muhammad. 2004. *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia*. Teraju
2. Ali Said Damanik. 2002. *Fenomena Partai Keadilan*. Jakarta: Teraju
3. Antar Venus. 2004. *Manajemen Kampanye, Panduan, Teoritis, dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
4. Asep Saepul Muhtadi. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
5. Burhanuddin Muhtadi. 2012. *Dilema PKS, Suara dan Syariah*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

6. E. Kosim. 1984. *Metode Sejarah Asas dan Proses*. Bandung: Unpad
7. Gugun Heryanto dan Irwa Zarkasyi. 2012. *Public Relations Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
8. Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya
9. Louis Gottschalk. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia
10. Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. 2007. *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera*.
11. Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. 2008. *Memperjuangkan Masyarakat Madani*
12. Miriam Budiardjo. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Bandung: Gramedia Pustaka Utama
13. Sapto Waluyo. 2005. *Kebangkitan Politik Dakwah, Konsep dan Praktik Politik PKS di Masa Transisi*. Bandung: Harakatuna Publishing
14. Toni Andrianus, Efriza dan Kemal Fasyah. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik, Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Penerbit Nuansa

## 2. Kritik

Setelah menelusuri dan mengumpulkan sumber, tahapan selanjutnya adalah kritik terhadap sumber yang sudah diperoleh. Tahapan kritik tentunya memiliki Tujuan salah satunya adalah otentitas.<sup>21</sup> Tahapan kritik meliputi dua macam, yaitu kritik *ektern* dan *intern*.

Menurut Kuntowijoyo, kritik yang disebut juga *verifikasi* atau kritik sumber atau keabsahan sumber, ada dua macam yaitu *otentitas* atau keaslian sumber melalui proses kritik *ekstern* dan *kredibilitas* atau dipercayai yaitu dengan kritik *intern*. Jadi intinya kritik *ekstern* dilakukan untuk

---

<sup>21</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia). 2014.hlm., 101



memperoleh sumber yang *otentik*. Sedangkan kritik *intern* dilakukan untuk memperoleh sumber yang *kredibel*.<sup>22</sup>

Kritik ekstern terhadap sumber lisan adalah mengamati aspek eksternal pengkisah. Dalam sumber lisan, penulis melakukan kritik ekstern yaitu melakukan wawancara dengan orang yang sehat Jasmani dan Rohani, serta jawabannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam tahapan kritik ekstern, dalam tahapan ini bertugas untuk menjawab pertanyaan<sup>23</sup>

- a) Apakah sumber itu sumber yang kita butuhkan ?

Pertanyaan ini mempersoalkan keotentikan sumber, dengan perkataan lain apakah sumber itu palsu atau tidak? Dalam tahapan ini cara meneliti sumbernya itu dengan meneliti tanggal, materi yang dipakai seperti tinta, pengetikan, pengarang, tanda tangan. Tulisan tangan dan jenis hurup yang dipakai.

- b) Apakah sumber itu asli atau tidak?

Pertanyaan ini dijawab dengan cara menganalisis sumber tertulis tentang bentuk fisik sumber apakah asli atau turunan, jenis kertasnya, jenis tulisannya apakah tulisan tangan, titik atau hasil print out. Proses ini penting terutama bagi dokumen-dokumen yang diperoleh dapat diperbanyak dan disalin dengan alat untuk memperbanyak, dalam penyalinan itu ada kemungkinan timbulnya perubahan dalam isi dokumen tersebut. Dokumen-dokumen zaman sekarang yang diperbanyak dengan difotocopy atau kertas karbon dapat dipercaya keasliannya dibandingkan disalin dengan cara ditulis tangan. Arsip-arsip yang penulis dapat kondisinya dapat dibaca dengan jelas dan merupakan hasil print out dan ada juga yang berbentuk dokumen. Meskipun demikian sumber ini kuat atau

---

<sup>22</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya). 1995. Hlm.,101

<sup>23</sup> E.Kosim, *Metode Asas dan Proses*, (Bandung: UNPAD). 1984. Hlm.,36

otentik dikarenakan ditulis dan dicetak langsung oleh pengurus DPD PKS Kabupaten Garut dan pengurus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

c) Apakah sumber ini diubah-ubah atau tetap utuh?

Pertanyaan ini harus dijawab dengan kritik teks. Kritik teks ini dilakukan untuk mengetahui isi teks asli atau tidaknya, asli disini berarti sesungguhnya dari tangan pelaku sejarah atau peristiwa tersebut (berupa dokumen) suatu dokumen yang dibuat dengan difotocopy atau kertas karbon untuk keperluan sejarah dianggap asli. Mengenai kritik ekstern jika diterapkan dalam sumber lisan dengan tujuan untuk menetapkan keotentikan suatu sumber dalam hal ini berarti dia adalah pelaku dalam sejarah atau saksi dari kejadian suatu peristiwa tersebut. Dalam tahapan ini penulis mendapatkan sumber lisan yang bisa dikatakan sumber primer dikarenakan yang diwawancarai merupakan orang-orang yang aktif di PKS sejak PKS didirikan.

Setelah melakukan kritik ekstern dan berhasil menetapkan bahwa sumber yang kita dapatkan itu adalah sumber yang kita cari. Maka selanjutnya memasuki tahapan kritik intern, dalam tahapan kritik intern atau masalah kredibilitas, bertugas untuk menjawab pertanyaan “apakah sumber kesaksian yang diperoleh kredibel atau dapat dipercaya?” untuk menjawab pertanyaan tersebut harus meliputi, *pertama* mengadakan penilaian intrinsik terhadap sumber yang dimulai dengan menentukan sumber tersebut, kemudian meneliti pengarang sumber. Dalam tahapan ini sumber yang diperoleh tidak ada keraguan dikarenakan sumbernya diperoleh langsung dari pelaku dan saksi sejarah tersebut kemudian dicocokkan langsung dengan meneliti sejauh mana dan bagaimana sumber itu akurat dengan judul Model Kampanye Partai Keadilan Sejarah tera dan tingkat perolehan suara tahun 2004-2014 di Kabupaten Garut.

*Kedua*, membandingkan kesaksian sumber, dalam tahapan ini kesaksian yang berkaitan dan yang tidak berkaitan dipilih kemudian menetapkan mana yang benar-benar menjadi saksi sejarah tersebut dan memilih dua sumber yakni sumber lisan dan sumber tulisan. Sumber lisan diantaranya wawancara dengan Wawan Kurniawan yang memaparkan sejarah berdirinya PKS kabupaten Garut kemudian perkembangannya seperti apa dan model kampanye Partai Keadilan Sejahtera dan tingkat perolehan suara tahun 2004-2014 di Kabupaten Garut.

Selanjutnya sumber tulisan sumber ini terbagi kepada dua bagian diantaranya sumber primer dan sumber sekunder yang termasuk sumber primer setelah dipilah dan dipilih antaranya Hasil pemilu legislatif tahun 2014, Struktur kepengurusan PKS, ppt Kampanye PKS (tim kampanye Jawa Barat) Kemudian yang dimaksud dengan sumber sekunder itu diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

Sumber lisan dan tulisan itu sendiri dipilih mana yang layak dijadikan sumber untuk melakukan penelitian, langkah selanjutnya memasukan sumber sekunder sebagai penunjang sumber primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut. *Ketiga*, korborasi (saling pendukungan antar sumber) sumber yang dikatakan primer setelah menggunakan kritik ekstern bisa jadi hasilnya melahirkan sumber yang asli dan tidak asli (palsu) akan tetapi sumber yang asli belum tentu menghasilkan informasi yang benar atau yang dipercaya keotentikannya, setelah dikritik secara intern barulah lahir sumber yang dapat dipercaya meskipun demikian sumber yang telah dikritik ini belum dapat dianggap sebagai fakta sejarah. Untuk mendapatkan sumber atau fakta sejarah harus diperlukan korborasi atau saling mendukung dari fakta dan data satu sumber dengan sumber yang lain, dimana tidak ada sifat yang saling merugikan tapi saling membantu satu sama lain.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ading Kusdiana dan Samsudin, *Panduan penyusunan dan penulisan skripsi Sejarah dan Peradaban Islam*, ( Bandung, Jurusan Sejarah dan Peradaban islam) 2014.

Pada tahap kritik intern, informasi dari sumber lisan dicek silang dengan informasi yang ada di buku dan arsip. Sumber tertulis dianalisis dan dinilai kekuatannya sebagai sumber sejarah. Informasi-informasinya sebagian bersifat primer dan sebagian bersifat sekunder.

### 3. Interpretasi

Setelah dilakukan kritik terhadap sumber, tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Tahapan interpretasi ini merupakan penafsiran terhadap data dan fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Menurut Garraghan, ada lima jenis interpretasi yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) *Interpretasi Verbal*, yaitu berkaitan dengan beberapa factor, yaitu Bahasa, perbendaharaan kata (*vocabulary*), tata bahasa, konteks dan penerjemahan
- b) *Interpretasi Teknis*, berdasarkan pada dua pertimbangan, yaitu tujuan penyusunan dokumen dan bentuk tulisan persisnya. Tujuan adalah penulis memiliki maksud yang lain selain tujuan menyampaikan informasi.
- c) *Interpretasi Logis*, yaitu interpretasi yang didasarkan atas cara berpikir logis. Artinya, berdasarkan cara berpikir yang benar. Jadi seluruh penafsirannya berisi gagasan yang logis.
- d) *Interpretasi Psikologis*, yaitu interpretasi tentang dokumen yang merupakan usaha untuk membacanya melalui kacamata pembuat dokumen untuk memperoleh titik pandangnya.
- e) *Interpretasi fakutal*, tidak didasarkan atas kata-kata, tetapi terhadap fakta.

---

<sup>25</sup>Sulasman, Loc. Cit., hlm. 118

Pada tahapan interpretasi penulis melakukan penafsiran terhadap data dan fakta yang telah berhasil diperoleh. Pada tahap ini penulis berudaha menghubungkan sumber yang diperoleh dan menyusunnya menjadi sebuah tulisan sejarah berdasarkan data dan fakta yang ada.

Keberhasilan sebuah Partai politik dapat dilihat dari kemenangan dalam perolehan jumlah suara yang diperoleh melalui dukungan dari pemilih serta dapat dilihat dari keberhasilan partai politik tersebut dalam memimpin Negara, bagaimana partai politik tersebut melaksanakan programnya dengan baik dan mampu melayani masyarakat. Dengan demikian maka yang dipersiapkan oleh partai politik itu adalah meningkatkan partisipasi rakyat dalam memilih.

Dalam hal ini PKS menggunakan gerakan Kultural, Gerakan Kultural adalah melakukan penyebaran kader keberbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk menggerakan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan, serta partisipasi politik. Menurut Saepullah Gerakan kultural juga bisa dikatakan dengan pengokohan kader, karena dalam menggaet masa PKS mengukuhkan terhadap kader-kader yangtelah dibina terlebih dahulu.

#### 4. Historiografi

Tahapan terakhir adalah tahapan Historiografi, tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam penyusunan sejarah. Setelah melalui tahapan pengumpulan sumber, kritik dan interpretasi, pada tahapan ini sumber-sumber yang diperoleh disusun menjadi sebuah tulisan sejarah berdasarkan data dan fakta yang ada.

Historiografi merupakan rekontruksi yang imajinatif dari pada masa lampau berdasarkan data yang dperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau.<sup>26</sup>

Adapun sistematika penulisannya:

---

<sup>26</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia). 1985.hlm. 32

BAB I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan langkah-langkah penelitian meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

BAB II merupakan bab gambaran umum mengenai sejarah berdirinya PKS di Indonesia dan keberadaannya di Kabupaten Garut tahun 2004-2014. Meliputi latar belakang berdirinya PKS di Indonesia, tahap perkembangan PKS dan pembentukan Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Garut.

BAB III merupakan bab yang membahas mengenai model kampanye, tingkat perolehan suara PKS di Kabupaten Garut tahun 2004-2014 dan hubungan Kampanye yang dilakukan oleh PKS dengan tingkat perolehan suara. Meliputi Eksistensi Partai Keadilan Sejahtera di Kabupaten Garut, model kampanye dan tingkat perolehan suara PKS tahun 2004-2014 di Kabupaten Garut dan Hubungan model kampanye dengan tingkat perolehan suara.

BAB IV merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

